

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi dan sosial yang paling mendasar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menurunkan tingkat kemiskinan meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta kesempatan ekonomi yang setara. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin pertama, yaitu *No Poverty* atau “Tanpa Kemiskinan”.

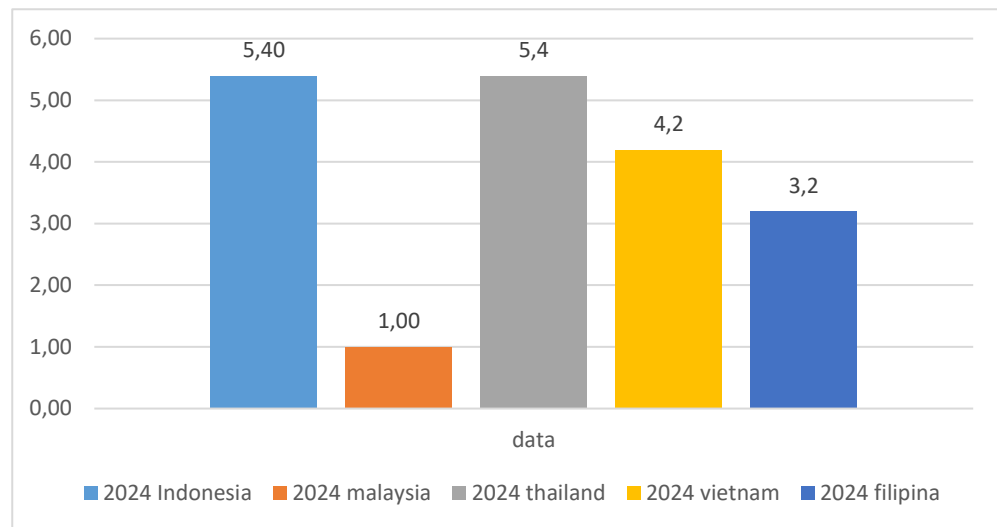
Selanjutnya gagasan mengenai pertumbuhan ekonomi tanpa kemiskinan berawal dari pemikiran para ekonom pembangunan modern seperti Amartya Sen dan Mahbub ul Haq yang menekankan pentingnya pembangunan manusia sebagai inti dari proses pertumbuhan ekonomi. Menurut Sen (1999) dalam karyanya *Development as Freedom*, pembangunan sejati bukan hanya peningkatan pendapatan nasional, tetapi perluasan, (Fukuda-Parr & Cid-Martinez, 2019).

Kebebasan dan kemampuan manusia untuk hidup secara layak. Pemikiran ini kemudian melahirkan pendekatan pembangunan inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan atau kemiskinan baru. dengan demikian, penting untuk mengimplementasikan strategi yang mendukung pertumbuhan inklusif, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, (Pilcher, 2022).

Kemiskinan menurut Djumiarti (2010) merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Kemiskinan ini dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk pendapatan, akses terhadap layanan dasar, dan kondisi kehidupan secara keseluruhan, (Baharudin, N.D.)

Menurut Sabokhat (2022) faktor- faktor seperti malas bekerja, keterbatasan Sumber Daya Alam, beban keluarga, pengangguran, pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan lebih rinci melalui data pada Tabel berikut:



*Sumber: World bank tahun 2024*

**Gambar 1.1 Perbandingan Kemiskinan di 5 Negara ASEAN (%)**

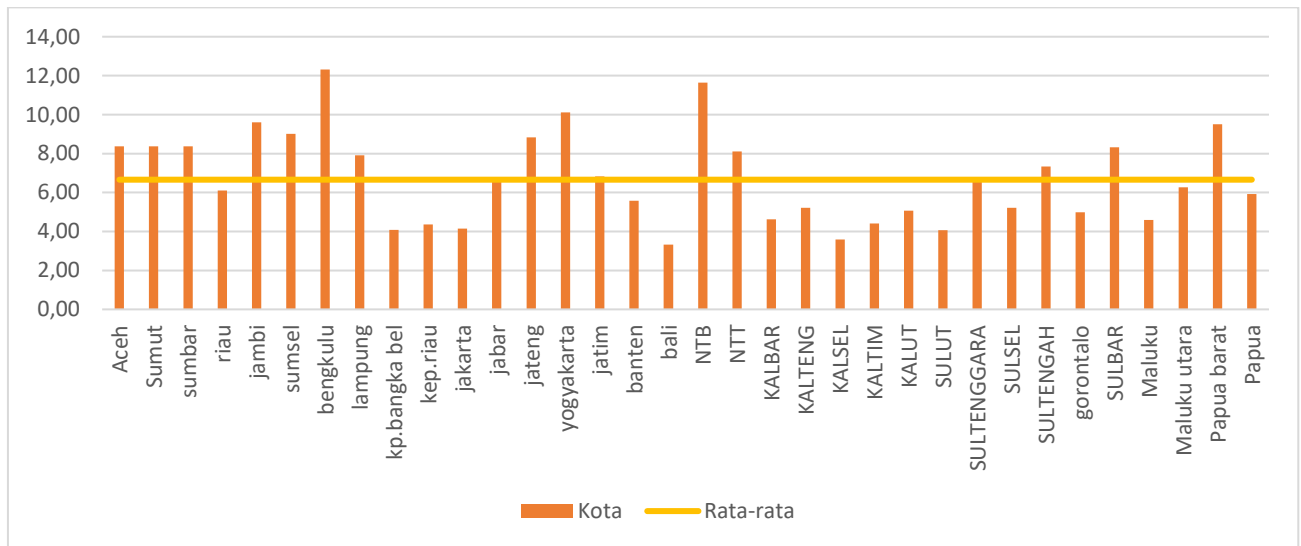
Berdasarkan perbandingan tingkat kemiskinan antar negara ASEAN pada Gambar 1.1, terlihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan beberapa negara tetangga. Meskipun Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural di dalam negeri, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta keterbatasan penciptaan lapangan kerja produktif. Selain itu, dinamika kependudukan dan konsentrasi aktivitas ekonomi yang semakin terpusat di wilayah tertentu turut memperumit upaya pengentasan kemiskinan. Perbedaan kemampuan wilayah dalam menyerap tenaga kerja, menyediakan pendidikan yang memadai, dan menjamin akses ekonomi yang layak menjadi faktor penting yang memengaruhi variasi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan di Indonesia yang bersifat multidimensional. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, penurunan kemiskinan belum terjadi secara merata. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan dasar, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan dalam hasil pembangunan.

Secara wilayah, kemiskinan di Indonesia terbagi menjadi kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan perdesaan umumnya dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas dan keterbatasan infrastruktur, sedangkan kemiskinan perkotaan memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena berkaitan dengan struktur ekonomi, pasar tenaga kerja, dan tingginya biaya hidup. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat dipahami secara seragam antara kota dan desa.

Fenomena yang menarik adalah masih tingginya kemiskinan di wilayah perkotaan, meskipun kota merupakan pusat aktivitas ekonomi, industri, dan jasa. Pertumbuhan ekonomi kota tidak selalu bersifat inklusif, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara merata. Urbanisasi yang tinggi tanpa diimbangi kesempatan kerja formal, dominasi sektor informal berpendapatan rendah, serta tingginya biaya hidup menyebabkan sebagian masyarakat perkotaan tetap berada dalam kondisi miskin. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks pembangunan, di mana pusat pertumbuhan ekonomi masih menghadapi persoalan kemiskinan yang signifikan.

Oleh karena itu, Gambar 1.2 disajikan untuk memberikan gambaran lebih spesifik mengenai fluktuasi angka kemiskinan di kota-kota Indonesia selama lima tahun terakhir.



Sumber: BPS Pusat Tahun 2024

**Gambar 1.2 Persentase Kemiskinan Kota, dan Rata-rata Nasional di Indonesia Tahun 2024 (%)**

Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan berada di bawah rata-rata nasional, nilainya masih tergolong tinggi dan belum mencerminkan kondisi kesejahteraan yang optimal. Fakta bahwa selisih antara kemiskinan kota dan rata-rata nasional relatif kecil mengindikasikan bahwa keunggulan ekonomi perkotaan belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Hal ini memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam perekonomian kota, di mana pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri yang tinggi tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang layak.

Dari sisi sosial ekonomi, kemiskinan di kota juga sering bersifat “tersembunyi” (*hidden poverty*), di mana penduduk yang tampak memiliki

pekerjaan ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum karena upah rendah dan tidak sebanding dengan pengeluaran harian.

Selain itu jumlah penduduk yang pesat di perkotaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, terutama akibat arus urbanisasi dan konsentrasi kegiatan ekonomi di kota-kota besar. BPS mencatat bahwa peningkatan jumlah penduduk perkotaan terus berlangsung dari tahun ke tahun, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk usia kerja dan kebutuhan terhadap lapangan kerja, perumahan, serta layanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kota menghadapi tekanan demografis yang semakin besar, (Ulya *et al.*, 2025).

Menurut Thomas Robert Malthus (1798) dalam Desmawan *et al.* (2023). pertumbuhan penduduk yang berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan ekonomi dalam menyediakan sumber daya dan kesempatan kerja akan menimbulkan tekanan sosial ekonomi yang berujung pada peningkatan kemiskinan. Pandangan ini masih relevan dengan kondisi perkotaan saat ini. Hal ini sejalan dengan Todaro dan Smith (2020) dalam Ulya *et al.* (2025) menjelaskan bahwa jumlah penduduk di perkotaan, khususnya yang dipicu oleh urbanisasi, akan memperbesar kemiskinan apabila sektor formal tidak mampu menyerap tambahan tenaga kerja. Data BPS memperlihatkan bahwa tingginya proporsi pekerja sektor informal di perkotaan berkorelasi dengan masih tingginya tingkat kemiskinan kota.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah penduduk, keterbatasan kesempatan kerja formal, dan peningkatan kemiskinan.

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan laju penciptaan lapangan kerja juga menimbulkan fenomena *urban poverty* atau kemiskinan di perkotaan. Banyak migran baru yang akhirnya bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang kaki lima, atau jasa kecil tanpa jaminan sosial dan upah layak. Di sisi lain, pesatnya pertumbuhan penduduk juga menimbulkan kepadatan hunian dan tekanan terhadap lingkungan, seperti munculnya permukiman kumuh di pinggiran kota, (Anisyaturrobiah, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sebab tingkat pendidikan dapat dijadikan sebagai dasar dalam melihat keberhasilan pembangunan dan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi tingkat keahlian begitu pula sebaliknya, bila tingkat pendidikan rendah maka keahlian yang dimiliki juga rendah sehingga tingkat penghasilan yang didapatkan akan rendah.

Secara substansial, tingkat pendidikan memiliki peran kunci dalam mengurangi kemiskinan karena pendidikan meningkatkan keterampilan,

produktivitas, dan peluang kerja seseorang. Kota-kota dengan rata-rata lama sekolah tinggi, seperti Jakarta dan Surabaya, memiliki angka kemiskinan rendah karena penduduknya lebih mudah mengakses pekerjaan formal dan pendapatan yang layak. Sebaliknya, kota di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki angka kemiskinan tinggi karena sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah.

Pendidikan merupakan faktor penting yang berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan kota karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang layak. Masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterampilan terbatas sehingga sulit bersaing di pasar kerja formal dan lebih banyak terserap di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan rumah tangga perkotaan terhadap kemiskinan, terutama di tengah tingginya biaya hidup di wilayah kota, (Ramadhan & Ginting, 2025). Berdasarkan teori modal manusia (*human capital*), pendidikan dipandang sebagai investasi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan memperoleh pendapatan. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam penelitian empiris di Indonesia, Sugiyanti *et al.* (2023)

Selain itu tingkat pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2020) dalam Payapo & Assel, (2023) pengangguran merupakan penyebab langsung kemiskinan karena ketiadaan pendapatan akan menurunkan kesejahteraan rumah tangga.

Temuan empiris di Indonesia juga menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Secara struktural, pengangguran di perkotaan banyak disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, serta ketidaksesuaian keahlian (*skill mismatch*) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, banyak tenaga kerja muda yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian pendapatan. Situasi ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan, karena pengangguran menyebabkan hilangnya sumber penghasilan rumah tangga, (Mitra, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa fenomena kemiskinan di kota-kota Indonesia masih menjadi permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan demografis. meskipun tren penurunan kemiskinan tampak positif, masih terdapat kesenjangan antar wilayah serta tantangan dalam menjaga kesinambungan penurunan tersebut di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan sosial yang cepat. Di sisi lain, peningkatan pendidikan dan penurunan pengangguran belum sepenuhnya menjamin penurunan kemiskinan yang merata, sebab masih ditemukan fenomena ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) serta disparitas kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan belum dapat dijelaskan secara sederhana dan memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam, (Paridah & Pahlevi, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya hanya menyoroti kemiskinan secara agregat di tingkat nasional atau provinsi tanpa membedakan karakteristik wilayah perkotaan. Sebagian besar kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2024) berfokus pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kemiskinan secara umum, tanpa menelaah secara spesifik dinamika sosial ekonomi di kawasan kota yang memiliki tekanan demografis dan struktural berbeda. Selain itu, banyak penelitian terdahulu yang hanya menggunakan satu atau dua variabel penyebab kemiskinan, misalnya pertumbuhan ekonomi atau pendidikan, tanpa mengaitkannya dengan faktor demografis seperti jumlah penduduk dan tingkat pengangguran secara simultan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat judul: Pengaruh Laju Perumbuhan Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota di Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran secara parsial terhadap Kemiskinan Perkotaan di 34 Provinsi Indonesia tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran secara bersama-sama terhadap Kemiskinan Perkotaan di 34 Provinsi Indonesia tahun 2020-2024.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran secara parsial terhadap Kemiskinan Perkotaan di 34 Provinsi Indonesia tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran secara bersama-sama terhadap Kemiskinan Perkotaan di 34 Provinsi Indonesia tahun 2020-2024.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

- a) Bagi pemerintah,

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah kemiskinan.

- b) Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

### **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan guna memperoleh data untuk menunjang usulan penelitian ini adalah di Badan Pusat Statistik (BPS).

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 6 bulan, dimulai pada bulan September 2025 sampai bulan Februari 2026. Berikut matriks jadwal penelitian penulis:

**Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Kegiatan	September		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Persiapan Administrasi	■																						
Pengajuan Judul		■																					
Penulisan Bab 1,2,3		■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Bimbingan				■	■	■	■	■	■	■													
Seminar UP											■	■	■	■	■	■	■						
Revisi UP											■	■	■	■	■	■	■						
Pengolahan Data											■	■	■	■	■	■	■						
Bimbingan											■	■	■	■	■	■	■						
Seminar Hasil																		■	■				
Revisi Semhas																		■	■				
Sidang Komprehensif																					■	■	
Revisi																					■	■	■